

Telaah hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Uji Kompetensi Berbahasa Indonesia (UKBI) = Legal review of Non-Tax State Revenue (PNBP) Indonesian Language Competency Test (UKBI).

Dinar Kartika Apriliani Wijayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501326&lokasi=lokal>

Abstrak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga, selain pajak dan hibah. pemerintah melaksanakan pnbp dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat indonesia. PNBP diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang pnbp. terdapat pnbp yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. salah satu jenis pnbp fungsional yang dilaksanakan oleh unit eselon I di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). pnbp ukbi diprakarsai oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa sebagai wujud kontribusi badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara. penerapan dasar hukum pnbp ukbi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia. seharusnya, sebelum penerapan dasar hukum pnbp ukbi, terdapat peraturan pelaksana yang memiliki fungsi mengatur terkait pengelolaan, maksud, tujuan, sasaran, dan perlindungan hukum pelaksanaan PNBP UKBI. akantetapi, peraturan pelaksana yang dimaksud belum disusun dan diundangkan sampai dengan peraturan pemerintah terkait pnbp di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan telah terlaksana. hal ini bertujuan mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat pengguna dan penerima manfaat layanan yang diberikan kementerian/lembaga. sehingga pada saat pengaturan terkait PNBP UKBI telah pasti secara hukum dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pnbp dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat indonesia.

<hr>

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a form of state revenue derived from services or services provided by the government/institution, in addition to taxes and grants. the government implements pnbp in order to increase state revenues aimed at the welfare of the indonesian people. PNBP is regulated by law number 9 of 2018 concerning PNBP UKBI. There is a PNBP implemented by the ministry of education and culture, which is further regulated in government regulation number 82 year 2016 types and rates of non-tax state revenues applicable to the ministry of education and culture. one type of functional pnbp implemented by the echelon i unit under the ministry of education and culture, is the indonesian language proficiency test (UKBI). The UKBI PNBP was initiated by the language development and development board as a form of the contribution of the agency/institution in increasing state revenue. the application of the legal basis for ukbi pnbp has been carried out in accordance with the provisions of the formation of indonesian laws and regulations. before the application of the legal basis for the UKBI PNBP, there should be an implementing regulation that has the function of regulating the management, purpose, objectives, targets, and legal protection of the implementation of the UKBI PNBP however, the implementing regulations referred to have not yet been drafted and promulgated until the government regulation related to PNBP within the

ministry of education and culture has been implemented. this aims to achieve legal certainty in the user and beneficiary community of services provided by ministries/agencies.